

Aktualisasi Nilai-Nilai Tradisional dalam Kepemimpinan Komunitas Lokal: Rekaman Awal Kepemimpinan Elit Lokal Karaeng Galesong

**H. Aminuddin Salle,
A. J. Bostan Daeng Mama'dja dan
Supriadi Hamdat
(Universitas Hasanuddin)**

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan rekaman awal sebuah penelitian mengenai *Gaukang* dan *Kalompoang* dalam komunitas orang Galesong. Galesong dalam perkembangannya sebagai komunitas dan bekas kerajaan berdaulat cukup berperan dalam pentas sejarah Sulawesi Selatan. Nama Galesong sudah tidak asing lagi terutama dalam hubungannya dengan Kerajaan Gowa dalam menentang dominasi Belanda (VOC) di Sulawesi Selatan. Dan bahkan nama Galesong menjadi populer ketika seorang

Rajanya *Karaeng Galesong* membantu perlawanan *Trunajaya* terhadap *Susuhunan Mataram Amangkurat I*.

Dalam sejarah perkembangannya sekitar awal Abad XV dimasa kejayaan Kerajaan Gowa, di pesisir pantai selatan Selat Makassar, berdiri sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Galesong dan diperintah oleh seorang raja yang bergelar *kare*, yang selanjutnya berubah menjadi *karaeng*. Kerajaan Galesong yang terletak di pesisir Selat Makassar mulai dari Aeng Towa di ujung utara dan berbatasan dengan Kerajaan Gowa sampai ke Mangindara di bagian selatan, dengan luas 68,10 km² dan terdiri dari 23 kampung, dimana 3 kampung diantaranya terletak di wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa yakni, Tangke Jonga, Bonto Koddopepe, Pare'-pare'. Kampung tersebut merupakan pemberian Raja Gowa kepada Karaeng Galesong yang bernama *I Mallarasang Daeng Magassing*.

Kerajaan Galesong pada zamannya, membawahi sepuluh Daerah *Kajannangang* dan *Gallarrang*, masing-masing:

1. *Gallarrang Aeng Batu-batu*
2. *Lo'mo Sampulungang*
3. *Jannang Campagaya*
4. *Anrong Guru Bontolebang*
5. *Anrong Guru Beba*
6. *Gallarrang Bontomangngape'*
7. *Jannang Mannyampa*
8. *Jannang Kodatong*
9. *Gallarrang Popo'*
10. *Jannang Mangindara*

Selain itu, Galesong juga menguasai pulau-pulau seperti Tanakeke, Bauluang, Satangngadan Dandoangang¹. Galesong secara kultur historis mewakili etnik Makassar dalam konstelasi perekonomian yang bercorak maritim².

Sekarang ini Galesong secara administratif merupakan wilayah Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan. Galesong sebagai sebuah komunitas Makassar dan bekas kerajaan berdaulat dari berbagai sisi memiliki kearifan tradisi dan nilai-nilai budaya yang menjadi *frame of reference* komunitasnya, terutama nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinan elit lokal *Karaeng Galesong*, yang barangkali masih sangat relevan untuk diangkat kepermukaan dalam rangka menyongsong otonomi daerah atau dengan perkataan lain apakah nilai-nilai tradisional tersebut masih *gayut* diaktualkan.

Kajian mengenai nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinan elit lokal sebagai salah satu dimensi sosial-kultural masyarakat dapat membantu rencana pembangunan yang diwarnai *stressing program* dan prioritas-prioritas untuk menjawab situasi konkrit masyarakat terutama menyangkut pemberdayaan komunitas lokal menyongsong otonomi daerah. Hal ini sangat *urgent* untuk menghindari pembangunan yang dilakukan secara drastis dengan

¹ Asisten Residen O. M. Goedhart, *Nota Over de Rechtsqemeenschappen in de onderafdeelingen Takalar en Jenepona*, Den Hag 13 Maret 1920. P. 48.

² Abdul Latif, *Galesong Di Masa Lalu, Studi tentang Sejarah Maritim di Sulawesi Selatan*. Lembaga Penelitian Unhas, 1994, Hal.4.

mengabaikan kearifan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat lokal, yang pada akhirnya akan bermuara menjadi *problem* bila menurut Peter L. Berger menuntut “korban manusia” karena kurang mempertimbangkan dimensi sosial budaya yang menjadi bingkai laku hidup masyarakat³.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan pada komunitas orang *Galesong* diketahui bahwa kepemimpinan elit lokal *Karaeng Galesong* masih sangat berperan dalam kehidupan komunitasnya, untuk itu pembahasan selanjutnya diketengahkan apakah nilai-nilai kepemimpinan tradisional masih relevan diangkat kepermukaan ataukah memang sudah tidak relevan lagi dengan konteks sosial yang dihadapi oleh masyarakat kita.

Nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinan elit lokal *Karaeng Galesong*

Dalam perspektif sosiologis yang disebut pemimpin ialah seseorang yang dapat memiliki pengaruh atas orang lain, dalam arti bahwa pemikiran, kata-kata dan tindakannya mempengaruhi tingkah laku orang lain. Dalam tatanan birokrasi tradisional seorang pemimpin, raja atau *karaeng* adalah panutan, simbol dari adat, semua sisi dari kehidupan seorang *karaeng* perilaku dan hubungan-hubungan sosialnya adalah pencerminan dari kehidupan dan kelembagaan tradisional yang disebut *Pangadakkang*.

Dalam sistem kepemimpinan tradisional sebagaimana yang di tampilkan oleh raja atau *karaeng* di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di daerah Makassar pada khususnya menunjukkan bahwa model-model kepemimpinan raja-raja bersumber dari naskah lontara⁴. Sebagaimana, ditegaskan oleh Mattulada bahwa dalam sistem kepemimpinan tradisional seperti yang tersirat dan tersurat dalam naskah lontara, rakyat, raja atau kelompok bangsawan (penguasa) merupakan unit sosial yang utuh. Dua komponen sosial ini pada hakekatnya tidak terpisahkan⁵. Mekanisme kehidupan politik dan sosial-budaya saling terkait dalam struktur sosial. Oleh sebab itu, menyebabkan sistem tingkatan sosial masyarakat bersifat terbuka⁶.

Dalam tatanan kepemimpinan elit lokal *Karaeng Galesong*, nampaknya tidak jauh berbeda dengan sistem kepemimpinan tradisional di beberapa kerajaan, seperti Kerajaan Gowa dan Tallo. Bahwa landasan utama dalam sistem kepemimpinannya senantiasa berpijak pada adat yang termaktub dalam lontara. Berdasarkan ajaran lontara itu,

moral kepemimpinan bagi seorang raja atau *karaeng* sangat mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, faktor moral merupakan faktor yang sangat menentukan berjaya dan tidak berjaya seorang pemimpin, raja atau *karaeng* atau penguasa di masyarakat. Moral merupakan landasan dan kriteria utama dari rakyat yang dipimpinya. Apabila moral seorang pemimpin atau raja telah dinilai terpuji oleh rakyatnya, maka tidak diragukan lagi bahwa adat akan mendukungnya, pemimpin atau *karaeng* yang bersangkutan senantiasa mendapat simpati dari rakyatnya. Kesediaan berkorban dari anggota masyarakat, termasuk kerelaan mengorbankan harta bendanya dan bahkan jiwanya yang paling berharga, akan terus mendukung bila moral seorang pemimpin atau penguasa memperlihatkan pula kesediaan untuk berkorban guna kepentingan rakyatnya. Artinya sosok seorang *karaeng* senantiasa menjadi pelindung rakyatnya, tidak memperkosa hak rakyatnya, dan menyanyangi rakyatnya seperti sang raja atau *karaeng* menyanyangi diri dan keluarganya. Sebaliknya, bila moral sang raja atau *karaeng*, tidak terpuji seperti hanya mementingkan diri dan keluarganya saja, berlaku tidak adil dalam memutuskan perkara di masyarakat, egoistis, serakah (korup), menindas rakyat, dan dikuasai oleh nafsu angkara murka. Maka tak ayal lagi sang raja yang bersangkutan akan dibenci oleh rakyatnya⁷.

Suatu cuplikan dalam tradisi lisan yang terdapat dalam komunitas orang *Galesong* yang mencerminkan bahwa seorang pemimpin seharusnya memiliki moral yang baik antara lain diungkapkan sebagai berikut :

<i>Ikambe juru mudia</i>	= Wahai pemimpin
<i>Jarreki tannang gulinnu</i>	= Perkuat pasang kemudimu
<i>Nu tea lalo</i>	= Jangan sekali-kali
<i>Toali riminalannu</i>	= Berpaling dari harapan
<i>Punggawa teako jekkong</i>	= Wahai pemimpin jangan berbuat curang
<i>Sawi teako ngarui</i>	= Sawi/pengikut janganlah resah
<i>I rate konteng</i>	= Di atas perahu
<i>Toddok puli minasaya</i>	= Tetapkan harapan kita

Tradisi lisan tersebut di atas mencerminkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh berbuat curang, dia sebagai sosok manusia yang menetapkan dan mengarahkan tujuan dan kemaslahatan orang banyak, dan orang yang dipimpipun harus seia-sekata dengan pemimpinnya.

Kriteria moral kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat dalam sebuah negara adalah berkaitan dengan moral agama (iman dan amal), maupun konsep hidup dalam tatanan interaksi sosial di masyarakat. Penilaian moral ini tidak hanya ditujukan pada pribadi sang *Karaeng* saja, tetapi juga segenap anggota kerabatnya. Khususnya terhadap sikap keluarga ini mutlak harus diperlihatkan sikapnya yang tegas di masyarakat jika sang penguasa berkeinginan

³ Frieds Meko, 'Dimensi Sosial Budaya Masyarakat Lokal Dalam Pembangunan'. (*Kompas*) 12 Februari 1998.

⁴ Lontarak adalah segala macam naskah yang biasanya ditulis di atas daun lontarak (Roundtallc) atau semacam manuskrip yang ditulis dengan tangan menggunakan aksara Bugis-Makassar.

⁵ Lihat Mattulada, Latoa, Tesis Doktor UI. Jakarta 1975

⁶ Hamid Abdullah, Andi Pangerang Petta Rani *Profil Pemimpin Yang Manunggal Dengan Rakyat*. Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 1985, Hal. 74.

⁷ Ibid, hal. 76

dihormati dan dipatuhi perintahnya. Sebab jika dia bersikap tegas hanya kepada rakyatnya saja, sedangkan kepada keluarganya atau kerabatnya memperlihatkan keraguan untuk bertindak tegas, bahkan berusaha melindungi kesalahan yang dibuat oleh keluarganya, maka jelas rakyat akan sukar mendukung kepemimpinannya dan bahkan akan mendapat cacat sosial dari rakyat yang dipimpinnya.

Sumber lontara menyatakan bahwa adat identik dengan hukum yang harus diikuti dan dipatuhi oleh rakyat termasuk kelompok bangsawan atau kerabat *karaeng* dan bahkan Raja sekalipun. Adat tidak mengenal anak dan tidak pula mengenal cucu, tidak mengenal penguasa, tidak mengenal orang kaya, miskin, tidak mengenal kelompok aristokrat, pendek kata adat atau hukum harus ditegakkan oleh setiap raja atau *karaeng* yang berkuasa demi terwujudnya rasa keadilan di masyarakat. Sebagai contoh, bagaimana bila ada raja atau *karaeng* yang tidak bermoral selama bertahta? Apa tindakan rakyat yang menjadi korban kezalimannya itu? Dalam lontara, cukup banyak diuraikan tentang tindakan rakyat terhadap raja dan penguasanya yang tidak bermoral selama memerintah. Contoh yang menarik disajikan disini adalah *I Tepu karaeng daeng Parabbung Raja Gowa XIII*, karena perbuatannya yang sewenang-wenang terhadap rakyat, termasuk berlagak angkuh terhadap para pembesar di Gowa dipecat dari jabatannya dan akhirnya pergi ke Luwu dan menetap di sana⁸. Contoh lain dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Galesong yang pernah terjadi pada tahun 1877-1878, yakni seorang warga masyarakat melakukan *salimara'* yaitu hubungan seks yang tidak wajar dengan saudara perempuan tirinya. Walaupun tindakan pelanggaran itu telah dikenakan hukuman berdasarkan peraturan Hindia Belanda, tetapi oleh masyarakat dipandang tidak menjamin kesucian masyarakat apabila tidak dikenakan sanksi adat. Karena itu *Lo'mo' Sampulungang* meminta kepada Kontrolir Kooreman agar menyerahkan pelaku kejahatan itu kepada penguasa adat, karena kejahatan yang demikian itu menurut adat harus dibunuh dengan memasukkan kedua orang yang melakukan hubungan seks tidak wajar itu ke dalam satu karung dan ditenggelmakan⁹.

Berdasarkan kedua contoh kasus di atas menunjukkan bahwa dalam sistem kepemimpinan tradisional/elit lokal kedudukan seorang *Karaeng*, sikap dan tingkah lakunya senantiasa berpangkal pada adat dan sistem hukum sebagaimana yang terdapat dalam pranata sosial masyarakat yang bersangkutan. Demikian pula sebaliknya jika rakyat yang melanggar ketentuan adat, maka rakyat yang melakukan pelanggaran tersebut mutlak dikenakan sanksi adat. Contoh ini merupakan fakta sejarah untuk melihat bagaimana kedudukan seseorang sama di depan hukum tanpa membedakan posisi sosialnya di masyarakat.

Selain faktor moral yang merupakan landasan kriteria seseorang layak menjadi pemimpin, dalam lontara juga dinyatakan bahwa apabila seorang raja atau putra mahkota telah disetujui oleh adat atau dewan kerajaan termasuk raja yang berkuasa, maka seyogyanya sebelum dia memangku tahta atau jabatan kerajaan mutlak harus melakukan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat mengetahui kehidupan rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Dengan perkataan lain raja atau *karaeng* belajar menjadi rakyat, mencoba mengidentifikasi persoalan yang sedang dihadapi rakyat, memahami apa yang menjadi keinginan rakyatnya, kerisauan hati rakyatnya¹⁰. Partisipasi seorang raja atau *karaeng* untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi rakyat merupakan upaya yang sangat tepat dan sekaligus merupakan suatu tindakan untuk lebih memudahkan seorang raja atau *karaeng* menetapkan suatu keputusan atau kebijakan mengenai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila unsur-unsur tersebut di atas telah terpenuhi maka akan menambah derajat *kepanutan* masyarakat terhadap *karaeng*.

Berkaitan dengan konteks di atas ada baiknya di ketengahkan pemikiran yang terkandung dalam lontara yang berkaitan dengan masalah moral seorang raja atau *karaeng* atau bangsawan terhadap rakyatnya. Pemikiran itu menyebutkan sebab musabab kehancuran sebuah negara sebagaimana pernyataan *Karaengta I Mangadaccing Daeng Sitaba Karaeng Pattingaloang*:

Nakana Karaenga lima pammanjenganna matena butta lompoa uru-uruna punna tea nipakainga' karaeng ma'gauka makaruanna punna taena tumangngasseng ilalang pa'rasangan lompoa; maka talluna, punna mangngalle soso'gallarang ma'bicaraiya; maka appa'na punna majai gau' ilalang pa'rasangan lompoa; maka limana punna tana kamaseangnga atanna karaeng ma'gauka.

Artinya: ada lima faktor yang dapat meruntuhkan suatu negara besar pertama raja yang memerintah tidak mau diperingati; kedua, tidak ada orang pandai, kelompok cendekiawan dalam negeri besar; ketiga, para hakim dan pejabat kerajaan dapat disuap; keempat, terlampau banyak masalah besar dalam negara itu; kelima, raja tidak mencintai rakyatnya.

Kelima faktor yang diceritakan oleh Karaengta ini merupakan penyakit masyarakat atau negara. Bila sang penguasa tidak memiliki atau rendah moralnya. Dalam konteks itulah, kualitas moral harus diperhatikan oleh seorang raja/karaeng selama masa pemerintahannya. Bagaimana agar moral seorang raja atau karaeng dapat dikontrol? Dalam hal ini pentingnya budaya siri berperan dalam kehidupan masyarakat¹¹.

⁸ Ibid, hal. 77

⁹ Mukhlis Paeni, *Landasan Kultural Dalam Pranata Sosial Bugis-Makassar*. Ujungpandang, PT. Sinar Krida, 1986 hal. 19

¹⁰ Abdullah, opsert, hal. 78

¹¹ Hamid Abdullah, *Manusia Bugis-Makassar*. Jakarta Inti Dayu Press. 1985. Hal. 88-89. Juga Tahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Ujungpandang, Husanuddin University Press, 1992, Hal. 144

Dalam sistem pemerintahan di Kerajaan Galesong pada umumnya dikenal dengan sistem Demokrasi Terpusat pada kekuasaan *karaeng* sebagai pemimpin yang kharismatik. Para *karaeng* langsung berhadapan dengan rakyatnya karena ia memiliki atau pemilik *kalompoang* dan membentuk pola kepemimpinan yang dikenal sebagai *Pamminawangngang Tojeng* (kepemimpinan langsung).

Munculnya konsep kepemimpinan langsung pada masyarakat di Kerajaan Galesong bersumber pada konsep *kalompoang* dan *gaukang* yang dianggap oleh masyarakat memiliki kekuatan *supranatural*. Oleh karena itu, *kalompoang* dan *gaukang* mengandung kebesaran atau kehormatan. *Kalompoang* dan *gaukang* merupakan atribut kerajaan. Konsep *gaukang* lebih menunjukkan pada benda dan hasil perbuatan (*Gau*=berbuat), sedang konsep *kalompoang* lebih mengaitkannya dengan jabatan tertentu, dan benda-benda tertentu yang ditemukan secara ajaib dengan bentuknya yang ajaib pula. Kooreman mengatakan bahwa *gaukang* adalah sebuah benda yang aneh bentuk ataupun warnanya, dapat berupa sebuah batu, sepotong kayu, buah-buahan tertentu, sepotong kain atau kadang-kadang senjata atau perisai dengan kekhususan tertentu. Pendeknya dia adalah benda aneh, yang diketemukan atau didapat dengan cara yang aneh, rahasia atau dengan cara yang luar biasa. *Gaukang* di Galesong misalnya berupa batu dengan rupa mirip tubuh manusia¹².

Sebuah *kalompoang* dapat berupa benda pusaka kerajaan atau benda peninggalan tokoh yang dinyatakan turun dari kayangan yang mereka nobatkan sebagai peletak dasar kerajaan. Benda ini merupakan jaminan pengabsahan yang memberikan kesaksian bahwa pemegang telah memiliki kekuasaan sebagai perwalian pemilik utama kekuasaan yang berasal dari *kalompoang* dengan demikian pemegang kekuasaan itu akan bekerja sesuai petunjuk pemilik utama kekuasaan itu bagi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat¹³.

Pemilik *gaukang* dan *kalompoang* berhak untuk duduk pada puncak kekuasaan untuk memimpin suatu kaum atau negeri dan dinobatkan sebagai pemimpin atas dasar keabsahan *gaukang* dan *kalompoang*. Dalam lingkungan *Karaeng Galesong*, *gaukang* dan *kalompoang* merupakan sumber legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, *Karaeng Galesong* diterima dan dihormati sebagai pemimpin *Pamminawangngang tojeng*. Selain itu, *kalompoang* atau *gaukang* berkaitan erat dengan anggapan masyarakat bahwa melalui benda itu pemegang, penerima kekuasaan dan akan terikat ikrar kepatuhan, ketaatan dan tata tertib yang diwarisi oleh pendiri kerajaan, sehingga dapat memikat pengakuan dan kataatan dari rakyat bahwa seseorang yang dianugrahi

memiliki *kalompoang* dan *gaukang* pada dirinya tercermin kepemimpinan karismatik yang pada akhirnya bermuara pada kedudukan seorang *karaeng* sebagai pemilik *kallabbirang* (kemuliaan), *kacaraddekang* (kepintaran), *kabaraniang* (keberanian), *kakalumayyangang* (kekayaan).

Seorang pemimpin adalah panutan, ia adalah simbol dari adat, semua sisi dari dimensi kehidupan seorang pemimpin atau *karaeng* perilaku dan hubungan-hubungan sosialnya adalah pencerminan *panggadakkang*. Disatu sisi *karaeng* sebagai suatu sosok *tunipinawang* (panutan) sedangkan rakyat sebagai sosok *tumminawang* (pengikut).

Sumber lontara mengatakan bahwa seorang pemimpin ideal apabila memiliki empat syarat kepemimpinan yaitu:

1. *Kacaraddekang* (kepintaran)
2. *Lambusu'* (kejujuran)
3. *Kabaraniang* (keberanian)
4. *Kakalumanyangang* (kekayaan)

Seorang pemimpin yang cerdas, cendikia memiliki empat unsur: a) Orangnya cinta pada perbuatan yang bermanfaat; b) Orangnya suka kepada kelakuan yang menimbulkan kamaslahatan; c) Orangnya jika menemukan persoalan selalu berusaha mengatasinya; d) Orangnya jika melaksanakan segala sesuatu selalu berhati-hati.

Adapun sifat *lambusu'* atau jujur berlawanan dengan sifat *jekkong* (curang). *Lambusu*; kejujuran mengandung empat hal utama yaitu:

1. *Tutui* (berbuat cermat)
2. *Baji bicara* (berbicara yang benar)
3. *Anggau' baji* (melakukan perbuatan yang bermanfaat)
4. *Kuntu tojeng* (bekerja dengan penuh kesungguhan dan bertanggung jawab)

Dikatakan pula bahwa seorang pemimpin yang jujur mencerminkan pribadi pemaaf artinya jika orang berbuat salah padanya, dia lantas memberi maaf, jika disertai amanat, dia tidak hianat, jika bukan bagiannya dia tidak menseerahkannya, dia bekerja untuk kebaikan orang banyak, bukan untuk dirinya sendiri.

Kabaraniang atau sifat pemberani pada hakekatnya mengandung empat unsur yakni:

1. *Tammallakkai nipariolo* artinya tak takut menjadi pelopor
2. *Tammallakkai nipariboko* artinya tak takut berdiri dibelakang dalam artian memberi kesempatan kepada orang lain yang lebih potensial (bersikap demokratis).
3. *Tammallakai allangngere' kabara* artinya tak gentar mendengar kabar baik maupun buruk, menerima kritik dan saran dari orang lain, berjiwa besar dan mempunyai sifat ingin tahu.
4. *Tammallakai accini bali'* artinya tak gentar menghadapi lawan, baik dalam berunding maupun berperang, tegas dan konsisten.

Berdasarkan cerita lisan yang berkembang di dalam masyarakat Galesong bahwa sifat pemberani telah dibuktikan oleh sejumlah orang Galesong dalam menentang dominasi

¹² Heddy Shri Ahimsa Putra, *Minawang Hubungan Patron-Klien Di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1988, Hal. 119.

¹³ Mukhlis, op. Cit, Hal. 23-25.

Belanda di tanah Makassar. Diceritakan bahwa <i>I Mangngopangi Daeng Ngutung</i> pernah mengucapkan janji dihadapan <i>Karaeng Galesong</i> , antara lain:	<i>Inakke ilaukanna</i>	Saya lebih ke barat lagi
<i>Bajimakianne abbannang kebo' karaeng</i>	<i>Karaengku jammeng</i>	Rajaku wafat
<i>Naki bulomo sibatang</i>	<i>Ikambe lingka tongiseng ri anja</i>	Kami meninggal jua
	<i>Pangkai jeraku karaeng</i>	Tetaklah kuburanku wahai Raja
	<i>Tinraki bate onjokku</i>	Patok bekas telapak kakiku
	<i>Tenakuero karaeng lari ri parang bali</i>	Tak kuingin lari dari medan perang
<i>Cera' sitongka-tongka</i>	<i>Nakiciniki I Yumara Daeng Mapasang</i>	Lihatlah I Yumara Daeng Mapasang
	<i>Bannang ejana Bajeng</i>	Benang merah dari Bajeng
	<i>Panjarianna tumanurunga ri Ko'mara</i>	Keturunan tumanurunga' ri Ko'mara
<i>Nanipajappa nikanayya kuntutojeng</i>		Selanjutnya kekayaan memiliki pula empat unsur, yakni:
<i>Assorong bokoi ero'na</i>		1. <i>Tamakurangi ri nawa-nawa</i> , artinya tak kehabisan inisiatif, penuh kreatifitas.
<i>Balandayya</i>		2. <i>Tamakkurangi ri bali bicara</i> , artinya tak kekurangan jawaban, kaya akan pengetahuan
<i>Aminasa dudutonga karaeng</i>		3. <i>Masagena ri sikamma gau</i> , artinya mahir dan terampil dalam setiap pekerjaan
<i>Ampannepokangi pasorang</i>		4. <i>Tamakurangi ri sikamma pattujuang</i> , artinya tak kekurangan usaha karena memiliki modal.
<i>Ma'tanga parang</i>		Selanjutnya dalam menjamin keikutsertaan rakyat kepada pemimpin, dalam kalangan masyarakat Makassar pada umumnya dan komunitas lokal di Galesong pada khususnya dikenal pula prinsip-prinsip perilaku kepemimpinan tradisional, sebagai berikut:
<i>Ampanumbangngangi balembeng ma'bangkeng romang</i>		1. <i>Mallakko ri Karang Allah Taala Bertakwalah kepada Tuhan Yang Maha Esa</i> . Suatu Simbol kebersamaan antara pemimpin dan yang dipimpin.
<i>Punna nia buranne karaeng rewanggang na inakke</i>		2. <i>Atinna tauwa nupa'lamung-lamungi Tanamlah suatu kebaikan kepada orang banyak (orang yang dipimpin)</i> . Dalam hal memupuk rasa cinta dan kebersamaan.
<i>Sere'lipa kuruai kusionjo' tompo bangkeng</i>		3. <i>Allel riwayat pelaki ruwaya Ingat setiap perbuatan orang lain kepadamu dan kesalahanmu atau kekeliruanmu kepada orang lain, serta lupakan perbuatan baikmu kepada orang lain dan perbuatan salah orang lain kepadamu</i> . Hal ini penting untuk integritas masyarakat.
<i>Kusikekke kamma lame kukamma mammo kicini karaeng</i>		4. <i>Cakkoi assalainu Sembunyikan asal keturunanmu biarkanlah orang lain yang menelusuri asal-usul kita dari pada kita mengembor-gemborkan</i> . Penting untuk mempertahankan wibawa.
<i>Tedong a'lagayya jarang sialle ganayya</i>		5. <i>Karaengi tauwa assala' mutowai Hormatilah orang yang diperintah (dipimpin) sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif</i> .
<i>Nampa kicinika I Mangopangi Daeng Ngutung</i>		Dalam kepemimpinan elit lokal di Galesong, ciri kepemimpinan maupun efektivitas kepemimpinan ditentukan oleh sifat-sifat kepribadian yang multidimensional. Antara lain bahwa kepemimpinan masyarakat senantiasa memperhatikan aspek demokratis yang sejak dulu menjadi bagian sikap kepemimpinan yang diharapkan, sehingga tidak saja berdasar kepada keturunan juga menuntut kemampuan, kecerdasan dan dukungan masyarakat.
<i>Campagana Bulukumpa</i>		
Sesudah <i>I Mangopangi</i> lalu berdiri <i>I Pasanri Daeng Kancing</i> bersumpah:		
<i>Manna ka' kanying ilau</i>		Walau awan berarak dibarat
<i>Bangkeng barakka kucini</i>		Hujan badai yang kulihat
<i>Tamminasayya</i>		Tak kuinginkan
<i>Towali ri' turanganku</i>		Kembali ke kampung halaman
<i>Eja tompiseng na doang karaeng</i>		
<i>Tumbang tompi na nicini</i>		Biarkan runtuh baru dilihat
<i>Nanisombali tangkana sikalia</i>		
Setelah itu, disusul kemudian <i>I Yumara</i> berikrar:		
<i>Bannang ejayya ri Bajeng</i>		Benang merah dari bajeng
<i>Tassampea ri Galesong</i>		Yang tersangkut di Galesong
<i>Tappuki na tamkombeka</i>		Putus tapi tak kendor
<i>Anrai-raiki karaengku</i>		Ke timurlah wahai raja
<i>Inakke irayanganta</i>		Saya lebih ke timur lagi
<i>Kalakalaukki karaengku</i>		Ke baratlah wahai raja

Suatu cuplikan yang mencerminkan aspek demokratis ketika terjadi pemilihan Raja Galesong XVII pada tanggal 6 Agustus 1952, dimana tiga orang calon dipilih langsung oleh sejumlah tokoh-tokoh masyarakat tani dan nelayan, kepala-kepala kampung, *gallarrang*, *jannang*, *anrong guru*, dan imam-imam kampung. Pada pemilihan tersebut disaksikan oleh Residen A. Mangkulla Dg. Parumpa yang mewakili Gubernur. Hasil dari pemilihan tersebut diketahui bahwa:

- a. A. J. Bostan Dg. Mama'dja memperoleh 85% suara.
- b. Abd. Kadir Dg. Toto memperoleh 10% suara.
- c. Nurung Dg. Tombong memperoleh 5% suara.

P e n u t u p

Berbicara tentang aktualisasi nilai-nilai tradisional dalam kepemimpinan komunitas lokal di Galesong pada dasarnya tidak terpisahkan dari lembaga adat yang disebut *pangngadakkang*. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mattulada bahwa adat-istiadat dalam masyarakat Bugis-Makassar merupakan salah satu kekuatan untuk menopang kelangsungan hidupnya. Dalam masyarakat tersebut terdapat seperangkat tata nilai sebagai salah satu unsur yang di yakini dan menjadi *frame of reference* tentang bagaimana seharusnya seseorang berbuat, bersikap dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai itulah yang mempengaruhi dan kadang-kadang dapat dikatakan "membentuk" keseluruhan "sikap" masyarakat terhadap satu orientasi, dan itulah yang muncul atau terpolakan keatas permukaan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam masyarakat Makassar pada umumnya dan komunitas orang Galesong pada khususnya, lembaga adat *pangngadakkang* yang syarat dengan nilai-nilai utama yang terhimpun dalam *sejumlah lontara* termaktub berbagai aspek dan nilai-nilai kepemimpinan yang menjadi acuan rakyat dan raja atau karaeng (kelompok bangsawan) ataupun pemerintah tentang siapa yang pantas dan tidak pantas dijadikan sebagai pemimpin. Dengan demikian pengambilan peran setiap anggota masyarakat pada dasarnya berpatokan pada hukum-hukum, norma-norma dan aturan-aturan adat yang mengatur tingkat laku pendukungnya. Itulah yang menyebabkan kita dapat menelusuri pranata sosial, kelakuan berpola dari masyarakat pendukung kebudayaan itu. Adat tata kelakuan dalam masyarakat Makassar, dilihat dari tingkah laku berpola dalam berkomunitas dan dalam hubungan kekerabatan.

Tingkah laku berpola dalam berkomunitas menyangkut pranata yang mengatur tingkah laku masyarakat dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Hal ini menyangkut nilai-nilai budaya dalam penataan pemerintahan. Pranata seperti ini disebut "*Siri' Butta*" yang secara berurutan diatur oleh *ada' butta*. *Ada butta* merupakan adat tata kelakuan bernegara yang menata kelakuan berpola dari anggota kesatuan kenegaraan menuntut kejujuran setiap warga untuk mematuhi segala hukum, norma, dan aturan kenegaraan dan bertanggung jawab terhadap keutuhan, keamanan dan ketertiban masyarakat¹⁴.

Akhirnya secara hipotetik dapat dikatakan bahwa nilai-nilai kepemimpinan dan kelembagaan tradisional yang terdapat dalam masyarakat Makassar, dan komunitas orang Galesong kelihatannya masih tetap relevan dan perlu diaktualkan, diimplementasikan dalam program-program pembangunan khususnya pembangunan desa dan daerah. Bahwa pranata-pranata lokal masih ada yang relevan untuk diaktualisasikan dalam sistem kepemimpinan di daerah senantiasa terkait dengan aspek kebudayaan. Sebagaimana dikatakan oleh Schien: *Culture and leadership are really two sides of the same coin one can not understand one without the other*¹⁵.

Kepustakaan

- Abdullah, Hamid
1991 *Andi Pangerang Petta Rani Profil Pemimpin yang Manunggal Dengan rakyat*. Jakarta: Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- 1985 *Manusia Bugis-Makassar*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Ahimsah, Shri H.
1988 *Minawang Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Latif, Abdul
1994 *Galesong Di Masa Lalu, Studi Tentang Sejarah Maritim di Sulawesi Selatan*. Ujungpandang: Lembaga Penelitian Unhas.
- Mama'dja, A. J. Bostan Daeng
1988 *Sejarah Kerajaan Dan Perjuangan Karaeng Galesong Pada Abad XV - XIX* (tidak dipublikasikan)
- Manyambeang, A. Kadir (dkk)
1983 *Jiwa Laut Dalam Sastra Makassar*. Ujungpandang: Universitas Hasanuddin.
- Meko, Frieds
1998 'Dimensi Sosial Budaya Masyarakat Lokal dalam Pembangunan'. *Kompas*, 12 Pebruari.
- Mg, A. Muin
1977 *Menggali Nilai Sejarah Kebudayaan Sulselra "Siri' dan Pacce"*. Ujungpandang: Mappress.
- Mattulada
1974 'Bugis-Makassar Dalam Manusia dan Kebudayaan'. Dalam *Berita Antropologi*, Terbitan Khusus No. 16
1975 Latoa. Jakarta: Tesis Doktor UI.

¹⁴ Ibid, hal 22

¹⁵ Schein, E. H. *Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View* Jassey, Bass. San Fransisco, inc Publisher, 1988: Pp. 23.

Paeni, Mukhlis (dkk)

1986 Kepemimpinan dan Kelembagaan di Sulawesi Selatan, (makalah) dalam 'Seminar Nasional HIPIS'.
Ujungpandang

1987 *Dinamika Bugis-Makassar*. Ujungpandang: Sinar Krida.

Patunru, Abdul Razak Daeng

1969 *Sejarah Gowa*. Ujungpandang: YKSSP.

Rahim, A. Rahman

1992 *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*.
Ujungpandang: Hasanuddin University Press.

Schein, E. H.

1988 *Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View*. San Fransisco: Jossey- Bass Inc Publisher.